



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN RANCANGAN ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kendali Dokumen:

Nama Penulis	Versi	Tanggal	Tanda Tangan
Devi Nurita	Kelompok I_ "Peningkatan Investasi"	09-09-2023	

Riwayat Dokumen

Riwayat Revisi

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Kesimpulan perubahan	Penulis

Referensi Dokumen

Nama Dokumen	Versi	Penulis
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024	Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Daftar Distribusi

Nama	Jabatan	Perusahaan	Keterangan

DAFTAR ISI

Riwayat Revisi	1
Referensi Dokumen	1
Daftar Distribusi	1
Daftar Isi	1
1. Ringkasan Eksekutif	3
2. Pendahuluan	6
2.1. Latar Belakang	6
2.2. Visi dan Misi Instansi	11
2.3. Tujuan dan Sasaran Instansi	11
3. Proses Bisnis Level-0	12
4. Arsitektur SPBE As-Is	13
5. Arsitektur SPBE To-Be	224
6. Peta Rencana SPBE	33
7. Penutup	36

1. Ringkasan Eksekutif

- Latar Belakang (Masalah dan Tujuan) :

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Visi SPBE :

“Terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Misi SPBE :

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun pondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal;
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Meningkatkan Keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Manfaat SPBE :

1. Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis Pemerintahan;
2. Menerapkan Standarisasi TIK dan Standarisasi Kualitas Layanan Digital Nasional (*Service Level Agreement*);
3. Memudahkan integrasi layanan Pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga menumbuhkan kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru;
4. Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;
5. Menghilangkan duplikasi aplikasi dan Infrastruktur TIK, serta memperkuat keamanan informasi;
6. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE.

Dampak SPBE :

Terwujudnya hasil berbagai program prioritas Pemerintah, seperti :

- Pengentasan Kemiskinan;
- Pemberantasan Korupsi;
- Peningkatan Investasi;
- Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tindak Lanjut Percepatan Penerapan SPBE :

1. Penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional, dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator;
2. Kebutuhan akan portal Nasional pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan;
3. Kebutuhan konsolidasi data di tingkat Nasional, dimulai dengan pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Penyusunan Timeline (Peta Rencana SPBE) Instansi, selaras dengan target Nasional;
5. Penguatan Tim Koordinasi SPBE pada instansi.

Rekomendasi Target Nasional Selaras Arsitektur SPBE Nasional :

1. Untuk digunakan seluruh layanan digital Pemerintah;
2. Tersedianya layanan digital Pemerintah secara terpadu.

- Arsitektur SPBE To-Be didasari analisis :

Arsitektur SPBE To-be adalah pengubah sekaligus jembatan pengubah strategi dan jembatan menuju pemanfaatan teknologi. Intinya adalah Strategi keselarasan Bisnis-Teknologi. Diharapkan IPPD dapat merencanakan visi jangka menengah 3-5 tahun sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sesuai dengan urusan dan fungsi Pemerintahan yang ditugaskan.

Pengembangan Arsitektur SPBE To-Be dimulai dari :

- Melakukan analisis terhadap kondisi terkini IPPD dengan Rencana Strategis IPPD;
- Menyelaraskan visi SPBE sebagai prinsip pengembangan dan membentuk arah SPBE IPPD dengan hasil analisis kondisi terkini IPPD.

Tujuan Arsitektur To-Be :

1. Basis informasi : Menyediakan Blueprint/ alat yang komprehensif sebagai acuan/arah penyelarasan untuk bisnis dan TI instansi;
2. Manajemen sumber daya TI yang terintegrasi : Memberikan dasar untuk mengurangi masalah manajemen TI yang timbul dari kapasitas dan kompleksitas sumber daya TI;
3. Interoperabilitas : Menyediakan landasan untuk interoperabilitas sistem melalui integrasi dan penyelarasan sumber daya TI.

Hasil Arsitektur To-Be :

1. Arah Arsitektur untuk Mencapai Visi IPPD;
2. Blueprint TI untuk Mendukung Kegiatan Bisnis;
3. Basis Informasi untuk Perencanaan Jangka Menengah/Panjang IPPD;
4. Penyediaan Arah TI yang Konsisten.

Arah pengembangan penyelenggaraan SPBE yang tertuang dalam Arsitektur SPBE secara garis besar memuat rencana penyelarasan bisnis dengan TI jangka menengah.

Tinjau persyaratan yang diperoleh dari arsitektur As-Is dan arahan bisnis/TI IPPD Tentukan status To-Be dan analisis kesenjangan antara status As-Is dan To-Be.

- **Gap Analisis dan Peta Rencana SPBE :**

- **Gap Analisis :**

Membandingkan Arsitektur SPBE As-Is dan Arsitektur SPBE To-Be, terdiri dari :

1. Analisislah kesenjangan (gap) dari kondisi saat ini (Arsitektur SPBE As-Is) dengan kondisi target (Arsitektur To-Be);
2. Susunlah rencana tindakan sebagai solusi atau perbaikan dari hasil analisis kesenjangan;
3. Tentukan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE IPPD berdasarkan Rencana tindakan Perbaikan yang sudah disusun.

Kerangka Kerja Penyusunan Gap Analysis SPBE IPPD :

1. Memahami Dokumen Strategis (Renstra/RPJMD) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan;

2. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang akan dikembangkan untuk Pencapaian Indikator Kinerja;

3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD);
4. Mengembangkan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
5. Evaluasi.

- **Matriks Peta Rencana SPBE :**

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Setiap Instansi perlu memiliki Peta Rencana SPBE IPPD, yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis/RPJMD, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan revaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Tujuannya :

Menyusun program dan kegiatan dengan ruang lingkup 7 muatan Peta Rencana SPBE berdasarkan gap analisis antara arsitektur As-Is dan Arsitektur To-Be.

Fungsinya :

Rencana transisi/Peta rencana merupakan panduan untuk keberlanjutan dan pentahapan pengembangan system.

Konsep Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah :

- RPJMD;
- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- Rencana Kerja dan Anggaran.

Koordinasi SPBE Nasional, yaitu : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penanggung Jawab Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, terdiri dari : Kelompok Kerja SPBE; dan OPD terkait lainnya.

Muatan Peta Rencana SPBE :

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu :

1. Tata Kelola;
2. Manajemen;
3. Layanan;
4. Aplikasi;
5. Infrastruktur;
6. Keamanan;
7. Audit TIK.

2. Pendahuluan**2.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Visi SPBE :

“Terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Misi SPBE :

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun pondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal;
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Meningkatkan Keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Manfaat SPBE :

1. Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis Pemerintahan;
2. Menerapkan Standarisasi TIK dan Standarisasi Kualitas Layanan Digital Nasional (*Service Level Agreement*);
3. Memudahkan integrasi layanan Pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga menumbuhkan kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru;
4. Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;

5. Menghilangkan duplikasi aplikasi dan Infrastruktur TIK, serta memperkuat keamanan informasi;
6. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE.

Sistem Informasi Arsitektur SPBE :

- Visi dan Misi SPBE;
- Referensi Arsitektur;
- Domain Arsitektur;
- Metadata Arsitektur;
- Manajemen Perubahan Arsitektur SPBE;
- Manajemen Risiko Arsitektur SPBE;

Dasar Hukum Arsitektur SPBE :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
4. Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE :

Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Domain Arsitektur SPBE Nasional :

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data & Informasi;
3. Domain Arsitektur Layanan SPBE;
4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE;

3 Komponen Arsitektur SPBE :

1. Referensi Arsitektur;
2. Domain Arsitektur;
3. Metadata Arsitektur.

Kompetensi Arsitektur SPBE terbagi 2, yaitu : Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. Kemampuan dalam hal merencanakan, merancang, mendesain, menerapkan/mengimplementasikan, mengkaji, mereviu, menilai, mengelola, dan mengendalikan arsitektur SPBE beserta sub sistem pembentuknya.

Manajemen Program dan Kegiatan SPBE :

1. Perencanaan;
2. Implementasi;
3. Pemeliharaan;
4. Evaluasi.

Metodologi Pembangunan Arsitektur SPBE :

1. Perencanaan Arsitektur;
2. Analisis & Desain Arsitektur;
3. Penyusunan Roadmap Inisiatif dan Implementasi;
4. Manajemen & Pengawasan Implementasi Arsitektur.

Keterkaitan Arsitektur SPBE dengan Peta Rencana SPBE :

Peta Rencana SPBE penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut, sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Dampak SPBE :

Terwujudnya hasil berbagai program prioritas Pemerintah, seperti :

- Pengentasan Kemiskinan;
- Pemberantasan Korupsi;
- Peningkatan Investasi;
- Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tindak Lanjut Percepatan Penerapan SPBE :

1. Penetapan target layanan digital berdasarkan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional, dipantau secara intensif oleh Kementerian Koordinator;
2. Kebutuhan akan portal Nasional pelayanan publik dan administrasi Pemerintahan;
3. Kebutuhan konsolidasi data di tingkat Nasional, dimulai dengan pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Penyusunan Timeline (Peta Rencana SPBE) Instansi, selaras dengan target Nasional;
5. Penguatan Tim Koordinasi SPBE pada instansi.

Rekomendasi Target Nasional Selaras Arsitektur SPBE Nasional :

1. Untuk digunakan seluruh layanan digital Pemerintah;
2. Tersedianya layanan digital Pemerintah secara terpadu.

Koordinator Arsitektur SPBE Nasional : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.



ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024

**Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi**

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. **Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Mendukung:
Tematik Pelayanan Publik
RB Tematik: Peningkatan Investasi
RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan
RB Tematik: Percepatan Prioritas Aktual Presiden

inisiatif
Strategis
2024



**Layanan Perizinan
Berusaha dan
Akreditasi Terintegrasi**

Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha dan akreditasi terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perizinan berusaha dan akreditasi yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan



**Layanan Monitoring
Pembangunan Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat**

Penyelenggaraan layanan pekerjaan umum, antara lain berupa pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi



**Layanan Pengadaan
Barang/Jasa
terintegrasi**

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem pengadaan secara elektronik, dengan fitur mencakup perencanaan, pelaksanaan, katalog, dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi

DTSKominfo2023®

ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024

**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

1. Kementerian Agama
2. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**
3. **Kementerian Kesehatan**
4. **Kementerian Sosial**
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Mendukung:
Program Nasional Penanganan Stunting
Tematik Pelayanan Publik
RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan

inisiatif
Strategis
2024

**Layanan Bantuan
Sosial
Terintegrasi**



**Kementerian
Sosial**

**Identifikasi K/L terkait dengan
layanan bantuan sosial terintegrasi**



**Layanan Pendidikan
Terintegrasi**

Relasi Layanan
Pendidikan



**Layanan Pendidikan
Terintegrasi**

Platform Digital
SATUSEHAT



**Layanan Kesehatan
Terintegrasi**

Tematik Program Nasional
Penanganan Stunting



DTSKominfo2023®



2.2. Visi dan Misi Instansi

Visi :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Misi :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;**
4. Mewujudkan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

2.3. Tujuan dan Sasaran Instansi

Tujuan :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat;

4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan;
5. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat;
6. Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas;
7. Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
8. Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis;

Sasaran :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja;
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi;
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik;
4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat;
5. Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat;
6. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat;
7. Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin;
8. Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
9. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan;
10. Menurunnya Pengangguran;
11. Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan;
12. Terjaminnya Kelestarian Lingkungan;
13. Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia;
14. Berkembangnya Ekonomi Kreatif;
15. Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan;
16. Meningkatnya daya saing Pendidikan;
17. Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat;
18. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing;
19. Terwujudnya Keluarga Bahagia;
20. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri;

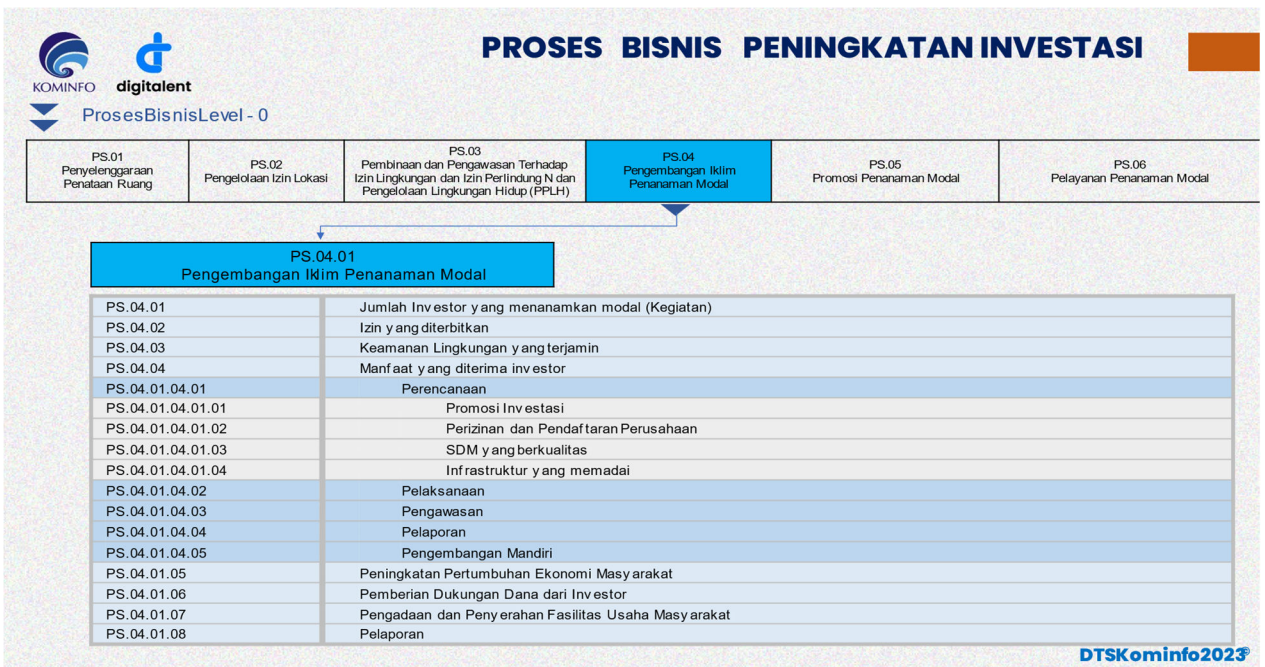
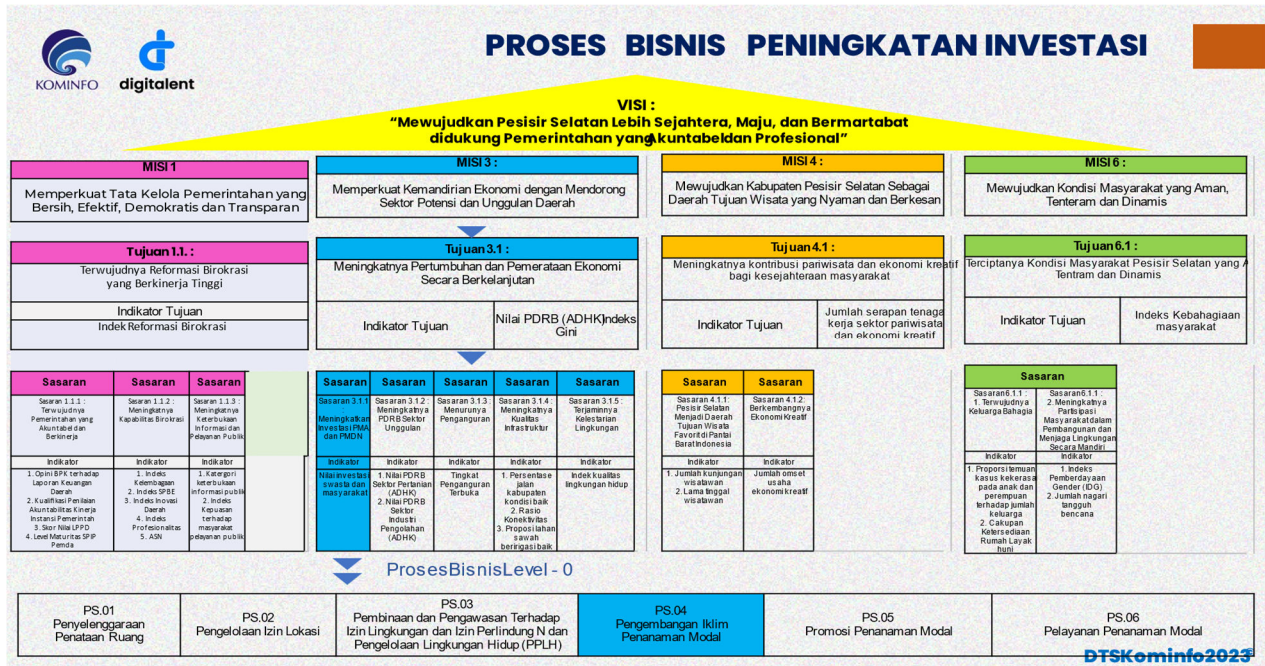
3. Proses Bisnis Level-0

Organisasi adalah entitas yang terdiri dari fungsi bisnis, proses, dan sumber daya untuk mengejar visi dan tujuannya. Konsep EA (Enterprise Architecture) : Cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur teknologi dan informasi keamanan yang diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya organisasi dengan lebih efektif dan efisien.

Arsitektur SPBE Menopang Reformasi Birokrasi Tematik :

1. RB Penanggulangan Kemiskinan;
2. RB Peningkatan Investasi;
3. RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden;
4. RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;

Proses Bisnis Level-0 Peningkatan Investasi



4. Arsitektur SPBE As-Is

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional yang telah dipetakan ke dalam *building block* tersebut, memiliki keterkaitan satu domain dengan yang lain. Masing-masing domain Arsitektur SPBE tersebut akan mengarahkan pada penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia secara elektronik yang terpadu, dimana Domain Proses Bisnis sebagai "otak" yang menciptakan berbagai Domain lainnya.

Building block Arsitektur SPBE Nasional ini kemudian dijadikan referensi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadi skema penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai kewenangan. Referensi arsitektur nasional ini menjadi standar pengetahuan bagi Instansi Pemerintah Pusat atau Daerah, sehingga dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab instansi melalui proses bisnis dan selaras dengan fungsi dari Kepala Instansi ataupun Kepala Daerah.

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional :

Layanan Perizinan Terpadu, Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, Layanan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Layanan Kesejahteraan Sosial, Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Layanan Pemerintahan Umum, dan Satu Data.

Domain Arsitektur SPBE dari Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah disusun pada matriks pengisian Arsitektur SPBE. Diawali dari pendefinisian dan pemetaan proses bisnis menjadi arsitektur proses bisnis SPBE.

Domain arsitektur SPBE tersebut kemudian dipetakan dengan referensi nasional dan referensi peta proses bisnis yang terdapat pada Instansi tersebut.

Sehingga setiap Domain Arsitektur SPBE yang dibuat dan disusun sesuai dengan arah kebijakan, strategi dan referensi terhadap tata kelola pemerintahan yang ada.

Alat Bantu/Tools :

Sistem Informasi Arsitektur SPBE-Template Domain Arsitektur SPBE :

- Telah dipersiapkan alat bantu untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE yang dapat memanfaatkan template excel dan Sistem Informasi Arsitektur SPBE atau SIA SPBE;
- SIA SPBE ditujukan untuk dapat menyimpan domain-domain Arsitektur dari setiap Instansi Pemerintah, baik Pusat atau Daerah ke dalam repositori tunggal Nasional;
- Fungsi repositori tunggal Domain Arsitektur SPBE setiap instansi agar dapat diintegrasikan dengan layanan dan kegiatan SPBE antar instansi.

Dokumen Persyaratan :

1. Rencana Strategis (Renstra);
2. Peta Proses Bisnis;
3. Data Katalog;
4. Dokumen SOTK.

4.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis As-Is

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi Pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan Pemerintahan.

Tujuan Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

1. Menggambarkan potensi kolaborasi antar instansi Pemerintah dan integrasi antar elemen fungsi Pemerintahan;
2. Menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengurangi pemborosan belanja TIK yang disebabkan oleh duplikasi belanja;
4. Memberikan analisis yang objektif dalam penyederhanaan birokrasi.

Struktur Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

- Tingkat 1 : Sektor Pemerintahan;
- Tingkat 2 : Urusan Pemerintahan;
- Tingkat 3 : Fungsi Pemerintahan;
- Tingkat 4 : Sub Fungsi Pemerintah.



Referensi Arsitektur Proses Bisnis Nasional (Level 1 dan 2)

Tabel 2. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional.		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang olahraga.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara.

DTSKOMINFO2023®

Format ID Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

Nama Instansi (strip) DAB (titik) Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 3 .. dst.

Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Nama Atribut Arsitektur Proses Bisnis As-Is :

1. ID;
2. Nama Proses Bisnis;
3. Uraian Proses Bisnis;
4. Referensi Arsitektur;
5. Sasaran Strategis;
6. Indikator Kinerja Utama;
7. Target IKU;
8. Realisasi IKU;
9. ID Metadata Terkait.

Referensi Arsitektur Bisnis SPBE Level 3 menggambarkan standar fungsi-fungsi Pemerintahan secara Nasional.

Tabel 3.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis As-Is

ID	Nama Bisnis/Usuhan (Daftarkan semua proses bisnis/usuhan pemerintahan yang diselenggarakan hingga ke proses bisnis terendah)	Usuhan Bisnis/Usuhan (Merupakan deskripsi dari usuhan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan ke dalam strategi/teselon 1 yang terkait dengan proses bisnis indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi indikator keberhasilan IKU yang ditargetkan)	Nilai IKU Terselesai (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	Unit Kerja (Dependency)	RAB Level 1 (National Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
PESSSEL KAB- DAB.02.08.04.01.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Proses Bisnis terkait dengan Pengembangan Iklim dan Investasi	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta dan masyarakat	310.000 Juta	679.234 Juta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanran Terpadu Satu Pintu	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08.04.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Penanaman Modal	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
PESSSEL KAB- DAB.02.08.04.01.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Proses Bisnis terkait dengan Pengembangan Iklim dan Investasi	Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta dan masyarakat	310.000 Juta	679.234 Juta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanran Terpadu Satu Pintu	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08.04.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Penanaman Modal	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE As-Is :

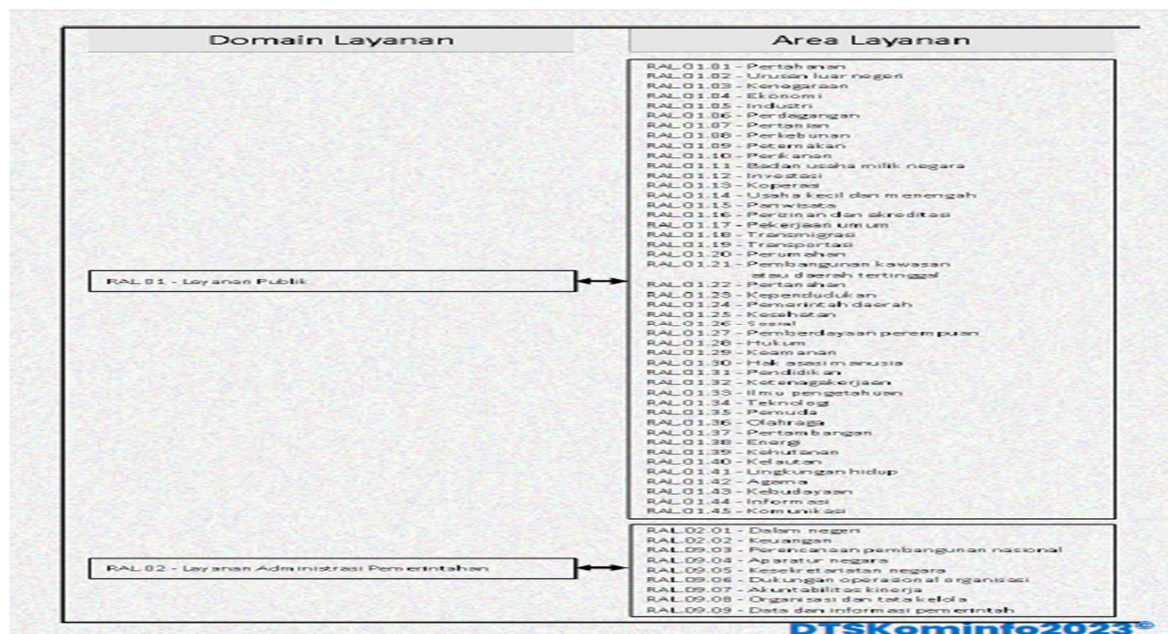
Melalui penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan Pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital Pemerintah terintegrasi.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu. Domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat.

Struktur Referensi Arsitektur Layanan As-Is :

- Tingkat 1 : Domain Layanan;
- Tingkat 2 : Area Layanan;
- Tingkat 3 : Kategori Layanan;
- Tingkat 4 : Sub Kategori Layanan.

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) : RAL adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu.



Identifikasi dan Validasi RAL

Format ID Arsitektur Layanan SPBE As-Is :

Nama Instansi (strip) DAL (titik) Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 3 .. dst.

Nama Atribut Arsitektur Layanan SPBE As-Is :

1. ID;
2. Nama Layanan;
3. Tujuan Layanan;
4. Fungsi Layanan;
5. Model Referensi Layanan;
6. Unit Pelaksana;
7. Kementerian/ Lembaga terkait;
8. Urusan Pemerintahan Terkait;
9. Target Layanan;
10. Metode Layanan;
11. Potensi manfaat;
12. Potensi ekonomi;
13. Potensi risiko;
14. Mitigasi risiko;
15. ID metadata terkait.

Tabel 3.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE As-Is

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Kementerian/ Lembaga Terkait (Dependency)	Urusan Pemerintahan → Pokok Level 2	Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko	Proses Bisnis	RAL Level 1 (Dependency)	RAL Level 2 (Dependency)	RAL Level 3 (Dependency)	RAL Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
PESSEL KAB-DAL 01.12.01.01.01	Layanan Publik	Untuk meningkatkan pelayanan investor dalam melakukan investasi	Memudahkan Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Kementerian Investasi BKPM	RAL 01.12. Investasi	95%	Elektronik	Investor mendapat peningkatan pelayanan ekonomi, kemudian membuka lapangan usaha dan potensi mengurangi	Terjadi peningkatan ekonomi	Validasi data investor	Update, verifikasi dan validasi data investor	- Pengelolaan Data Investor - Fasilitas Data Investor - Validasi Data Investor	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.12. Investasi	RAL 01.12.01 Pembinaan Perencanaan Modal Regional		Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

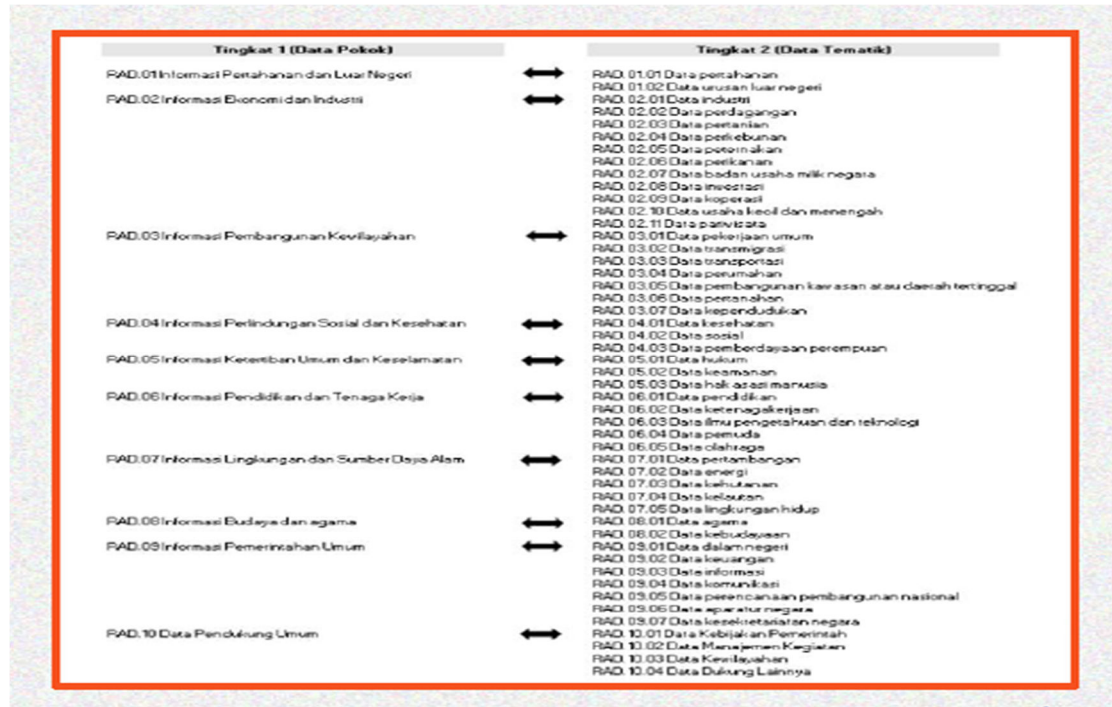
4.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi As-Is :

1. Untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya.
2. Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di Pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi.
3. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip Satu Data Indonesia.
4. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi :

- Tingkat 1 (Data Pokok);
- Tingkat 2 (Data Tematik);
- Tingkat 3 (Data Topik);
- Tingkat 4 (Data Sub Topik);






KOMINFO

digitalent

Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat 1 dan 2

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data hubungan luar negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Data koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan.

Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data ilmu pengetahuan	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan.
06.04	Data teknologi	Data yang merepresentasikan bidang teknologi.
06.05	Data pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.06	Data olahraga	Data yang merepresentasikan bidang olahraga.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.
07.04	Data kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Informasi Budaya dan agama (08)		
08.01	Data agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data dalam negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data aparaturnegara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparaturnegara.
09.07	Data kesekretariatan negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

DSTKominfo2023

DTSKominfo2023®

1. Data Input;
2. Layanan;
3. Data Output;

Format ID Arsitektur Data dan Informasi As-Is :

Komponen Arsitektur Data dan Informasi As-Is :

1. ID Data;
2. Nama Data;
3. Uraian Data;
4. Tujuan Data;
5. Sifat Data;
6. Jenis Data;
7. Validitas Data;
8. Produsen Data/Penanggung Jawab Data;
9. Interoperabilitas;
10. Proses Bisnis (*Dependency*);
11. Layanan (*Dependency*);
12. RAD Level 1 (*Dependency*);
13. RAD Level 2 (*Dependency*);
14. RAD Level 3 (*Dependency*);
15. RAD Level 4 (*Dependency*);

[illegible]

Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :

Devi Nurita_Kelompok I_“Peningkatan Investasi”

- Pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat Perpres SPBE (berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan).
- Tujuan pembangunan dan layanan Pemerintahan (Peraturan per Undang-Undang serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan).
- Standardisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka).

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :

- Tingkat 1 (Domain Aplikasi);
- Tingkat 2 (Area Aplikasi);
- Tingkat 3 (Kategori Aplikasi);
- Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi);

Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat Nasional As-Is :

1. Aplikasi Umum :
 - Aplikasi Umum Layanan Publik;
 - Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan;
2. Aplikasi Khusus :
 - Aplikasi Khusus Misi Tertentu;
 - Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu;

Nama Atribut Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :

1. ID;
2. Nama Aplikasi;
3. Uraian Aplikasi;
4. Fungsi Aplikasi;
5. Kode Model Referensi SPBE;
6. Layanan yang didukung;
7. Data yang digunakan;
8. Luaran;
9. Basis Aplikasi;
10. Server Aplikasi
11. Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman;
12. Bahasa Pemrograman;
13. Kerangka Pengembangan;
14. Basis Data;
15. Unit Pengembang;
16. Unit Operasional Teknologi;
17. ID Metadata Terkait.

Format ID Arsitektur Aplikasi SPBE As-Is :

Nama Instansi (strip) DAA (titik) Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 3 .. dst.

[illegible]

Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :

- 


Taksonomi

Referensi Arsitektur Infrastruktur

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

Catatan: Arsitektur Infrastruktur Platform Perangkat Keras Jaringan berbeda dengan Arsitektur Infrastruktur Sistem Integrasi Jaringan Intra Pemerintah, dimana Jaringan Intra Pemerintah dikenal dengan sebutan Pusat Kendali Jaringan dan perangkat keras platform jaringan adalah perangkat keras yang menghubungkan satu aplikasi dengan server dan jaringan saja.



Untuk dapat menyusun Domain Arsitektur Infrastruktur, perlu dipetakan dengan kebutuhan dari Aplikasi-aplikasi yang berjalan dalam mendukung Arsitektur Layanan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Atribut Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :

1. ID;
2. Nama;
3. Deskripsi;
4. Tipe;
5. Status Kepemilikan;
6. Nama Pemilik;
7. Biaya Layanan;
8. Unit Pengembang;
9. Unit Operasional;
10. Jangka Waktu Pelayanan;
11. ID Metadata Terkait.

Format ID Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is :

Nama Instansi (strip) DAI (titik) Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 1 (titik) Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 2 (titik) Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 3.

Tabel 3.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE As-Is

ID	Nama Fasilitas Konten	Bandwidth Internet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan (Informator)	Unit Kerja/Pengembang	Instansi Pemilik	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Sistem Penghubung Layanan (Dependency)	Jaringan Intra (Dependency)	Standar Teknis dan SPBE (Dependency)	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (Dependency)	Identifikasi Risiko Keamanan SPBE (Dependency)	Peningkatan Keamanan SPBE (Dependency)	Penerapan Insiden Keamanan SPBE (Dependency)	Audit Keamanan SPBE (Dependency)	Kelompok Keamanan SPBE (Dependency)	Instansi (Dependency)
PESSEL	Pusat Data Nasional	-	-	Jakarta	Instansi Pemerintah Lain	Unit Kerja/Pengembang	Kementerian Kominfo	RAI Level 1 Fasilitas Komputasi	RAI Level 2 Pusat Data Nasional											Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

4.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE As-Is

Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD.

Cakupan Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

1. Penjaminan kerahasiaan : dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
2. Penjaminan keutuhan : dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
3. Penjaminan ketersediaan : dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
4. Penjaminan keaslian : dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi;

5. Penjaminan kenirsangkalan : dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital;
6. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

- Tingkat 1 (Domain Keamanan);
- Tingkat 2 (Area Keamanan);

Domain Arsitektur Keamanan (DAK) :

Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. <i>Output</i> dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. <i>Output</i> dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Standar Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

Domain Arsitektur Keamanan Instansi Pemerintah merupakan penerapan standar-standar dalam menjamin dan implementasi keamanan informasi. Pengisian Domain Arsitektur Keamanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: Standar, Penerapan, dan Kelaikan Keamanan.

Nama Atribut Arsitektur Keamanan SPBE As-Is :

1. ID;
2. Nama Standar Keamanan;
3. Jenis Standar Keamanan;
4. Deskripsi;
5. Tanggal Mulai Penerapan;
6. Tanggal Akhir Penerapan;
7. ID Metada Terkait.

Tabel 3.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE As-Is

ID	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan (Isikan sekarang jika peraturannya masih digunakan sampai saat ini)	Instansi (Dependency)
1	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021	1. Standar Nasional dan/ atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan tentang manajemen keamanan informasi dan standar teknis dan prosedur penerapan keamanan SPBE	01-01-22	Sekarang	Kemenpan RB

5. **Arsitektur SPBE To-Be**

Arsitektur SPBE To-be adalah pengubah sekaligus jembatan pengubah strategi dan jembatan menuju pemanfaatan teknologi. Intinya adalah Strategi keselarasan Bisnis-Teknologi. Diharapkan IPPD dapat merencanakan visi jangka menengah 3-5 tahun sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sesuai dengan urusan dan fungsi Pemerintahan yang ditugaskan.

Pengembangan Arsitektur SPBE To-Be dimulai dari :

- Melakukan analisis terhadap kondisi terkini IPPD dengan Rencana Strategis IPPD;
- Menyelaraskan visi SPBE sebagai prinsip pengembangan dan membentuk arah SPBE IPPD dengan hasil analisis kondisi terkini IPPD.

Tujuan Arsitektur To-Be :

1. Basis informasi : Menyediakan Blueprint/ alat yang komprehensif sebagai acuan/arah penyelarasan untuk bisnis dan TI instansi;
2. Manajemen sumber daya TI yang terintegrasi : Memberikan dasar untuk mengurangi masalah manajemen TI yang timbul dari kapasitas dan kompleksitas sumber daya TI;
3. Interoperabilitas : Menyediakan landasan untuk interoperabilitas sistem melalui integrasi dan penyelarasan sumber daya TI.

Hasil Arsitektur To-Be :

1. Arah Arsitektur untuk Mencapai Visi IPPD;
2. Blueprint TI untuk Mendukung Kegiatan Bisnis;
3. Basis Informasi untuk Perencanaan Jangka Menengah/Panjang IPPD;
4. Penyediaan Arah TI yang Konsisten.

Arah pengembangan penyelenggaraan SPBE yang tertuang dalam Arsitektur SPBE secara garis besar memuat rencana penyelarasan bisnis dengan TI jangka menengah.

Tinjau persyaratan yang diperoleh dari arsitektur As-Is dan arahan bisnis/TI IPPD Tentukan status To-Be dan analisis kesenjangan antara status As-Is dan To-Be.

Tugas :

- Tentukan Arah To-Be : Tinjau persyaratan dan analisis lingkungan bisnis/TI dan kembangkan arah arsitektur To-Be dengan Hasil Kerja Arah Arsitektur To-Be;
- Tulis Hasil Kerja : sesuai dengan arahan arsitektur To-Be dan format standar dengan Hasil Kerja Produk Arsitektur;
- Analisis Kesenjangan : Periksa cakupan arsitektur To-Be dibandingkan dengan arsitektur As-Is serta Turunkan perbedaan antara arsitektur As-Is dan To-Be dengan Hasil Kerja Analisis Kesenjangan Arsitektur As-Is/To-Be.

Tahapan Pengembangan Arsitektur To-Be :

1. Pertimbangan untuk Pendirian Arsitektur To-Be :
 - Arah Untuk Setiap Area Arsitektur : Terapkan bisnis yang diinginkan instansi dan perubahan TI serta Terapkan persyaratan pemangku kepentingan untuk perbaikan;

- Kelayakan : Tetapkan arsitektur To-Be yang layak, dengan mempertimbangkan kerangka waktu antara status As-Is dan To-Be (3 hingga 5 tahun) serta Tinjau arsitektur To-Be secara teratur dan pertimbangkan peningkatan;
- Hubungan Antara As-Is dan To-Be Arsitektur : Arsitektur To-Be harus mencakup semua komponen dalam arsitektur As-Is dan Pertimbangkan hubungan antara area arsitektur dalam arsitektur As-Is dan To-Be.

2. Pertimbangan untuk Pendirian Arsitektur To-Be :

- Penggunaan Referensi Model : Identifikasi dan terapkan komponen yang dapat digunakan kembali menggunakan model referensi serta Pertimbangkan untuk menggunakan model referensi untuk menyelaraskan arsitektur lembaga dengan arsitektur Pemerintah;
- Survei Persyaratan TI : Dapatkan persyaratan pengguna dari wawancara dan/atau survei, dan terapkan dalam mengembangkan arahan arsitektur To-Be;
- Kegunaan Arsitektur To-Be : Tentukan ruang lingkup (bisnis, aplikasi, data, teknis, keamanan) dan kedalaman (perencana, pemilik, manajer, pengembang) arsitektur To-Be dan pertimbangkan penggunaannya (evaluasi proyek TI, dll).

Mendefinisikan Arah Arsitektur To-Be :

- Pendapat pengguna (persyaratan TI, analisis tuntutan, dll);
- Implikasi arsitektur To-Be berasal dari analisis arsitektur As-Is.

Tinjauan Arsitektur To-Be :

- Visi/Prinsip Arsitektur;
- Karakteristik Arsitektur As-Is dan Analisis Persyaratan TI : analisis kebutuhan TI serta implikasi dari analisis arsitektur As-Is;
- Implikasi Untuk Arsitektur To-Be : Dokumentasikan arah arsitektur To-Be, kumpulkan umpan balik, dan selesaikan.

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-Be :

- Tinjau arsitektur As-Is untuk mendapatkan persyaratan dan arahan;
- Gunakan model referensi dan standar untuk menganalisis detail komponen EA; dan
- Buat perubahan pada arsitektur As-Is dan buat arsitektur To-Be.

5.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis To-Be

Pengembangan Arsitektur Proses Bisnis To-Be :

Tentukan Inovasi Proses Bisnis dari layanan Pemerintah yang selaras dengan metamodel bisnis dan arah prinsip proses bisnis serta tujuan arsitektur As-Is.

Persyaratan Arsitektur Proses Bisnis To-Be :

1. Analisis SOTK dan Renstra :
 - Analisis SWOT strategi bisnis;
 - Analisis Rantai Nilai data dan bisnis;
 - Pemetaan Perbaikan Proses Bisnis *Business Process Improvement* (BPI);
2. Arah Kerangka Kerja EA :
 - Membuat peta referensi metamodel As-Is dengan artefak inovasi BPI;

3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
 - Peluang Peningkatan Arsitektur Bisnis As-Is sebagai inovasi.

Domain Arsitektur Proses Bisnis To-Be :

1. Arah Kerangka Kerja Arsitektur To-Be : Membuat peta referensi metamodel As-Is dengan artefak inovasi BPI.
2. Mengidentifikasi Fungsi Bisnis;
3. Mengembangkan Arsitektur Bisnis.

Selanjutnya, proses bisnis yang telah ditentukan untuk dilakukan inovasi atau improvement, disesuaikan dengan :

- Visi lembaga,
- Fungsi bisnis dan;
- Tujuan peningkatan yang diharapkan.

Terakhir mendefinisikan bagan proses bisnis, hingga mendefinisikan metadata Arsitektur Bisnis yang telah dilakukan inovasi.

Nama Atribut Arsitektur Proses Bisnis To-Be :

1. ID;
2. Nama Proses Bisnis;
3. Uraian Proses Bisnis;
4. Referensi Arsitektur;
5. Sasaran Strategis;
7. Indikator Kinerja Utama;
8. Target IKU;
9. Realisasi IKU;
10. ID Metadata Terkait.

Tabel 4.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
1.	DOMAIN PROSES BISNIS			
	Proses Bisnis terkait dengan Pengembangan Iklim dan Investasi	Belum maksimalnya pengembangan iklim dan investasi yang dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kab. Pesisir Selatan.	Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif diperlukan menarik investor untuk menanamkan modal di Kab. Pesisir Selatan, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

5.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Layanan To-Be :

Tentukan layanan Pemerintah yang sejalan dengan persyaratan bisnis, prinsip arsitektur layanan, dan tujuan arsitektur As-Is, serta layanan pemerintah internal dan eksternal yang saling mendukung.

Persyaratan Arsitektur Layanan To-Be :

1. Analisis Manajemen Arsitektur Layanan :
 - Analisis SWOT layanan;
 - Analisis SIPOC data dan bisnis;
 - Analisis manajemen layanan.
2. Arah Kerangka Kerja EA :
 - Informasi sel arsitektur layanan;
 - Prinsip arsitektur layanan;
 - Bisnis, data, aplikasi, struktur dan arah arsitektur teknis.
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
 - Info Arsitektur Layanan As-Is;
 - Peluang Peningkatan Arsitektur;
 - Layanan As-Is.

Domain Arsitektur Layanan SPBE To-Be :

1. Mengembangkan Arsitektur Bisnis;
2. Arah Arsitektur Layanan;
3. Derivasi Arsitektur Layanan;
4. Pengembangan Arsitektur Layanan.

Nama Atribut Arsitektur Layanan SPBE To-Be :

1. ID;
2. Nama Layanan;
3. Tujuan Layanan;
4. Fungsi Layanan;
5. Model Referensi Layanan;
6. Unit Pelaksana;
7. Kementerian/ Lembaga terkait;
8. Urusan Pemerintahan Terkait;
9. Target Layanan;
10. Metode Layanan;
11. Potensi manfaat;
12. Potensi ekonomi;
13. Potensi risiko;
14. Mitigasi risiko;
15. ID metadata terkait.

Tabel 4.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
2.	DOMAIN LAYANAN			
	Layanan Publik	Belum terealisasinya izin prinsip yang telah dikeluarkan.	Meningkatkan kualitas pelayanan dari segi Sumber Daya Manusia, Waktu dan Biaya.	Semua aspek pendukung iklim investasi harus terus ditingkatkan, realisasi pemberian izin yang masih dalam rentang 2-7 hari mesti diupayakan agar lebih singkat dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik.

5.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi To-Be

Pengembangan Arsitektur Data dan Informasi To-Be :

Tentukan struktur data dan antarmuka yang sejalan dengan persyaratan bisnis, prinsip arsitektur data, dan tujuan arsitektur As-Is.

Persyaratan Arsitektur Data dan Informasi To-Be :

- Analisis Manajemen Arsitektur Data :
 - Analisis status penggunaan data;
 - Analisis struktur data;
 - Analisis standar data;
 - Analisis manajemen data;
- Arah Kerangka Kerja EA :
 - Informasi sel arsitektur data;
 - Prinsip arsitektur data
 - Bisnis, aplikasi, struktur dan arah arsitektur teknis;
- Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
 - Info Arsitektur Data As-Is;
 - Peluang Peningkatan Arsitektur;
 - Data As-Is;

Domain Arsitektur Data dan Informasi To-Be :

- Mengembangkan Arsitektur Data;
- Arah Arsitektur Data;
- Derivasi Elemen Arsitektur Data;

Komponen Arsitektur Data dan Informasi To-Be :

1. ID Data;
2. Nama Data;
3. Uraian Data;
4. Tujuan Data;
5. Sifat Data;
6. Jenis Data;
7. Validitas Data;
8. Produsen Data/Penanggung Jawab Data;
9. Interoperabilitas;
10. Proses Bisnis (*Dependency*);
11. Layanan (*Dependency*);
12. RAD Level 1 (*Dependency*);
13. RAD Level 2 (*Dependency*);
14. RAD Level 3 (*Dependency*);
15. RAD Level 4 (*Dependency*);

Tabel 4.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
3.	DOMAIN DATA DAN INFORMASI			
	Data Investor	Kurang validnya data potensi investasi pada sektor-sektor strategis.	Mengidentifikasi data investasi untuk dijadikan bahan bagi investor dalam pengurusan izin investasi (<i>clean and clear</i>).	Menyajikan data investor dengan valid sesuai dengan SOP yang berlaku (Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021)

5.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be**Pengembangan Arsitektur Aplikasi To-Be :**

Identifikasi aplikasi unit dan kembangkan arsitektur aplikasi sambil mempertimbangkan hubungan dengan arsitektur bisnis dan data.

Persyaratan Arsitektur Aplikasi To-Be :

1. Analisis Tren Sistem Aplikasi :
 - Analisis tren sistem aplikasi dan solusinya;
 - Analisis pedoman dan regulasi;
 - Analisis praktik terbaik.

2. Arah Kerangka Kerja EA :
 - Informasi sel arsitektur aplikasi;
 - Prinsip arsitektur aplikasi;
 - Bisnis, layanan, data, struktur dan arah arsitektur teknis;
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
 - Info Arsitektur Aplikasi As-Is;
 - Peluang Peningkatan Arsitektur;
 - Aplikasi As-Is;

Domain Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be :

1. Pengembangan Arsitektur Layanan;
2. Pengembangan Arsitektur Data;
3. Identifikasi Fungsi Aplikasi;
4. Temukan Aplikasi;
5. Pengembangan Arsitektur Aplikasi.

Nama Atribut Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be :

1. ID;
2. Nama Aplikasi;
3. Uraian Aplikasi;
4. Fungsi Aplikasi;
5. Kode Model Referensi SPBE;
6. Layanan yang didukung;
7. Data yang digunakan;
8. Luaran;
9. Basis Aplikasi;
10. Server Aplikasi
11. Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman;
12. Bahasa Pemrograman;
13. Kerangka Pengembangan;
14. Basis Data;
15. Unit Pengembang;
16. Unit Operasional Teknologi;
17. ID Metadata Terkait.

Tabel 4.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
4.	DOMAIN APLIKASI			
	Aplikasi Sicantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) dan Aplikasi OSS (<i>Online Single Submission</i>)	Belum sesuai penggunaan aplikasi perizinan dengan penerapan SOP yang berlaku.	Mempermudah investor dalam penggunaan akses layanan perizinan melalui aplikasi.	Mempromosikan aplikasi perizinan kepada investor untuk bisa mengakses layanan menggunakan aplikasi tersebut.

5.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Infrastruktur To-Be :

Turunkan persyaratan to-be dari analisis tren teknis dan arahan arsitektur dan tentukan model teknis To-Be.

Persyaratan Arsitektur Infrastruktur To-Be :

1. Analisis Tren Teknologi :
 - Analisis tren untuk teknologi yang ada;
 - Analisis tren untuk teknologi baru;
 - Analisis teknologi integrasi antar lembaga;
 - Analisis TRM/SP.
2. Arah Kerangka Kerja EA;
 - Informasi sel arsitektur teknis;
 - Prinsip arsitektur teknis;
 - Bisnis, data, aplikasi, struktur dan arah arsitektur data;
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
 - Info Arsitektur Teknis As-Is Peluang Peningkatan Arsitektur Teknis As-Is.

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE To-Be :

1. Technical Architecture Directions;
2. Technical Elements Definition;
3. Technical Architecture Development.

Technical Architecture Development, terdiri dari Metadata : Metadata Fasilitas Komputasi, Metadata Perangkat Keras Server, Metadata Perangkat Keras Keamanan, Metadata Jaringan Intra Pemerintah, Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan, Metadata Perangkat Lunak Platform, Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Metadata Perangkat Keras Jaringan, Metadata Komputasi Awan, Metadata Perangkat Keras Periferal.

Pemetaan Metadata Arsitektur Infrastruktur :

Penyusunan metadata Arsitektur Infrastruktur yang dilakukan perbaikan atau inovasi sesuai dengan kebutuhan inovasi proses bisnis, data, layanan, dan aplikasi.

Tabel 4.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
5.	DOMAIN INFRASTRUKTUR			
	Pusat Data Nasional	Belum optimalnya investor memperoleh informasi data tentang ketersediaan lahan untuk kebutuhan investasi.	Mewujudkan regulasi tentang penyediaan data untuk peningkatan investasi dalam hal penyelesaian potensi lahan yang produktif.	Menyediakan data informasi mengenai peta (geospasial) lahan potensial bagi investor untuk melakukan investasi.

5.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE To-Be

Pengembangan Arsitektur Keamanan To-Be :

Menganalisis arah bisnis dan arsitektur lainnya, mendapatkan persyaratan keamanan melalui analisis masalah keamanan dan kebijakan keamanan agensi, dan menentukan model keamanan yang komprehensif.

Persyaratan Arsitektur Keamanan To-Be :

1. Analisis Tren Keamanan :
 - Analisis masalah keamanan;
 - Analisis tren teknologi keamanan;
 - Analisis pedoman keamanan;
 - Analisis tren keamanan informasi.
2. Arah Kerangka Kerja EA :
 - Informasi sel arsitektur teknis;
 - Prinsip arsitektur teknis;
 - Pemetaan Bisnis, Layanan, dan Data Kritis;
 - Arah arsitektur keamanan.
3. Informasi Arsitektur As-Is dan Peluang Peningkatan :
 - Info Arsitektur Keamanan As-Is Peluang Peningkatan Arsitektur Keamanan As-Is.

Domain Arsitektur Keamanan SPBE To-Be :

1. Arah Arsitektur Keamanan;
2. Penurunan Komponen Arsitektur Keamanan;
3. Arsitektur Keamanan Perkembangan.

Arsitektur Keamanan Perkembangan : Metadata Standar Keamanan, Metadata Peningkatan Keamanan, Metadata Edukasi Keamanan, Metadata Identifikasi Keamanan.

Nama Atribut Arsitektur Keamanan SPBE To-Be :

1. ID;
2. Nama Standar Keamanan;
3. Jenis Standar Keamanan;
4. Deskripsi;
5. Tanggal Mulai Penerapan;
6. Tanggal Akhir Penerapan;
7. ID Metadata Terkait.

Tabel 4.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE To-Be

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be

NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
6.	DOMAIN KEAMANAN			
	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021	Belum optimalnya keamanan data sehingga bisa terjadinya kebocoran data.	Melindungi data investor dengan menjaga kerahasiaan data investor agar tidak diketahui oleh pihak lain.	Menerapkan peraturan tentang manajemen keamanan informasi, standar teknis dan prosedur penerapan keamanan data investor.

6. Peta Rencana SPBE

6.1. Gap Analysis

Melakukan Gap Analysis :

Membandingkan Arsitektur SPBE As-Is dan Arsitektur SPBE To-Be, terdiri dari :

1. Analisislah kesenjangan (gap) dari kondisi saat ini (Arsitektur SPBE As-Is) dengan kondisi target (Arsitektur To-Be);
2. Susunlah rencana tindakan sebagai solusi atau perbaikan dari hasil analisis kesenjangan;
3. Tentukan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE IPPD berdasarkan Rencana tindakan Perbaikan yang sudah disusun.

Kerangka Kerja Penyusunan Gap Analysis SPBE IPPD :

1. Memahami Dokumen Strategis (Renstra/RPJMD) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. **Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang akan dikembangkan untuk Pencapaian Indikator Kinerja;**
3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD);
4. Mengembangkan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
5. Evaluasi.

Tabel 5.1. Gap Analysis

Analisis Pengembangan Arsitektur SPBE To-be				
NO.	AS-IS	ANALISIS	TO-BE	RENCANA TINDAK
1.	DOMAIN PROSES BISNIS			
	Proses Bisnis terkait dengan Pengembangan Iklim dan Investasi	Belum maksimalnya pengembangan iklim dan investasi yang dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi.	Meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kab. Pesisir Selatan.	Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif diperlukan menarik investor untuk menanamkan modal di Kab. Pesisir Selatan, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2.	DOMAIN LAYANAN			
	Layanan Publik	Belum terealisasikannya izin prinsip yang telah dikeluarkan.	Meningkatkan kualitas pelayanan dari segi Sumber Daya Manusia, Waktu dan Biaya.	Semua aspek pendukung iklim investasi harus terus ditingkatkan, realisasi pemberian izin yang masih dalam rentang 2-7 hari mesti diupayakan agar lebih singkat dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik.
3.	DOMAIN DATA DAN INFORMASI			
	Data Investor	Kurang validnya data potensi investasi pada sektor-sektor strategis.	Mengidentifikasi data investasi untuk dijadikan bahan bagi investor dalam pengurusan izin investasi (<i>clean and clear</i>).	Menyajikan data investor dengan valid sesuai dengan SOP yang berlaku (Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021)
4.	DOMAIN APLIKASI			
	Aplikasi Sicantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) dan Aplikasi OSS (<i>Online Single Submission</i>)	Belum sesuai nya penggunaan aplikasi perizinan dengan penerapan SOP yang berlaku.	Mempermudah investor dalam penggunaan akses layanan perizinan melalui aplikasi.	Mempromosikan aplikasi perizinan kepada investor untuk bisa mengakses layanan menggunakan aplikasi tersebut.
5.	DOMAIN INFRASTRUKTUR			
	Pusat Data Nasional	Belum optimalnya investor memperoleh informasi data tentang ketersediaan lahan untuk kebutuhan investasi.	Mewujudkan regulasi tentang penyediaan data untuk peningkatan investasi dalam hal penyelesaian potensi lahan yang produktif.	Menyediakan data informasi mengenai peta (<i>geospasial</i>) lahan potensial bagi investor untuk melakukan investasi.
6.	DOMAIN KEAMANAN			
	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021	Belum optimalnya keamanan data sehingga bisa terjadinya kebocoran data.	Melindungi data investor dengan menjaga kerahasiaan data investor agar tidak diketahui oleh pihak lain.	Menerapkan peraturan tentang manajemen keamanan informasi, standar teknis dan prosedur penerapan keamanan data investor.

6.2. Matriks Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang akan dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu.

Setiap Instansi perlu memiliki Peta Rencana SPBE IPPD, yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis/RPJMD, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Tujuannya :

Menyusun program dan kegiatan dengan ruang lingkup 7 muatan Peta Rencana SPBE berdasarkan gap analisis antara arsitektur As-Is dan Arsitektur To-Be.

Fungsinya :

Rencana transisi/Peta rencana merupakan panduan untuk keberlanjutan dan pentahapan pengembangan system.

Konsep Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah :

- RPJMD;
- Arsitektur SPBE;
- Peta Rencana SPBE;
- Rencana Kerja dan Anggaran.

Koordinasi SPBE Nasional, yaitu : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penanggung Jawab Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, terdiri dari : Kelompok Kerja SPBE; dan OPD terkait lainnya.

Muatan Peta Rencana SPBE :

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu :

1. Tata Kelola;
2. Manajemen;
3. Layanan;
4. Aplikasi;
5. Infrastruktur;
6. Keamanan;
7. Audit TIK.

Kerangka Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD :

1. Memahami Dokumen Strategis (Renstra/RPJMD) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Gap Analisis Kapabilitas Layanan yang akan dikembangkan untuk Pencapaian Indikator Kinerja;
3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD);
- 4. Mengembangkan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;**
5. Evaluasi.

Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE :

Alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE, meliputi proses sebagai berikut :

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

Tabel 5.2. Matriks Peta Rencana SPBE

KELOMPOK 1 : PENINGKATAN INVESTASI						
No	Project/Activities		UIC	Baseline 2022	Target 2023 2024	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)						
Indikator	(Indikator)				(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1	Tata Kelola					
	A	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Pesisir Selatan	Dinas PMPTSP	1 Perda	-	-
		- Pembustan Peta Potensi Investasi Kab. Pesisir Selatan	Dinas PMPTSP	10 Buku	12 Buku	15 Buku
	B	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	1 SOP	-	-
		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Pesisir Selatan	Dinas PMPTSP	1 SOP	-	-
	C	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	5 Laporan	8 Laporan	10 Laporan
		- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Dinas PMPTSP	5 Laporan	8 Laporan	10 Laporan
2	Manajemen					
	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB. PESISIR SELATAN	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3	Layanan					
	A	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	30 Izin	32 Izin	35 Izin
		- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Pesisir Selatan	Dinas PMPTSP	30 Izin	32 Izin	35 Izin
	B	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	5 Kali	7 Kali	9 Kali
		- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab. Pesisir Selatan	Dinas PMPTSP	5 Kali	7 Kali	9 Kali
4	Aplikasi					
	A	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INVESTASI	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
		- Penyediaan aplikasi berbasis investasi	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
5	Infrastruktur					
	A	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INVESTASI	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Infrastruktur Data	1 Infrastruktur Data	1 Infrastruktur Data
		- Penyediaan Infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan investasi	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Infrastruktur Data	1 Infrastruktur Data	1 Infrastruktur Data
6	Keamanan					
	A	PROGRAM KEAMANAN DATA & INFORMASI INVESTOR	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Akun Data Investor	1 Akun Data Investor	1 Akun Data Investor
		- Penyediaan sarana keamanan data & informasi investor	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Akun Data Investor	1 Akun Data Investor	1 Akun Data Investor
7	Audit TIK					
	A	PROGRAM EVALUASI TIK UNTUK INVESTASI	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		- Monitoring dan mengevaluasi TIK yang berhubungan investasi	Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

7. Penutup

Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Peningkatan Investasi merupakan prioritas program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja sebagai penjabaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Periode Tahun 2021-2026. Melalui perencanaan yang baik diharapkan pencapaian output kinerja sesuai, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan bersinegris dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Rancangan Arsitektur SPBE dapat dilakukan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga program dan kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diperlukan upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini dijadikan sebagai bahan pedoman dalam Penyusunan Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Peningkatan Investasi Kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Akhir Penyusunan Rancangan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang Peningkatan Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen Rancangan Arsitektur SPBE untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan ke depan. Rancangan Arsitektur SPBE ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan Rancangan Arsitektur SPBE dimasa mendatang oleh Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke depan arah yang lebih baik dimasa akan datang.